

BAB III

PERUBAHAN PILIHAN POLITIK MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA ATAS LIMA PARTAI UTAMA PEROLEHAN SUARA NASIONAL PEMILU 2004 DAN PEMILU 2009

A. Hasil Penelitian

1. Peta Politik Wilayah Kota Yogyakarta

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait dan para tokoh masyarakat, terutama yang asli penduduk Kota Yogyakarta, maka peta politik Kota Yogyakarta dapat digambarkan sebagai berikut:

Masyarakat Kota Yogyakarta secara umum sudah berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dalam pemilihan umum. Sebagian besar warga masyarakat Kota Yogyakarta menggunakan hak pilihnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 4.

Partisipasi politik warga masyarakat Kota Yogyakarta berbanding lurus dengan hubungan ideologi. Mayoritas penduduk Kota Yogyakarta abangan nasionalis, maka dalam pemilu, partai yang unggul atau pilihan mayoritas masyarakat cenderung jatuh pada partai-partai nasionalis.

Pada zaman Orde Lama partai nasionalis menjadi pilihan mayoritas masyarakat Kota Yogyakarta waktu itu, yakni PKI, PNI dan Grinda. Pada pemilu kedua di Orde Reformasi yaitu pada Pemilu Legislatif 2004, pilihan mayoritas masyarakat kembali terulang kepada partai-partai bernuansa nasionalis. Meskipun terjadi pergeseran pilihan antara Pemilu 2004 dengan

Pemilu 2009, namun pergeseran tersebut tetap terjadi pada partai-partai nasionalis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel rekapitulasi perolehan suara Pemilu Legislatif 2004 dan 2009 pada lampiran 1.

Sebuah partai tertentu biasanya memiliki satu atau beberapa kelompok massa andalan. Kelompok ini merupakan tambang emas perolehan suara. Kelompok massa yang mempunyai preferensi kuat dan selalu memilih suatu partai tertentu disebut basis massa. Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan masing-masing kecamatan tersebut merupakan basis massa bagi partai politik tertentu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1:
Data Wilayah Basis Massa Partai Politik

No.	Nama Kecamatan	Basis Massa
1.	Mantrijeron	Partai Demokrat
2.	Kraton	PAN
3.	Mergangsan	PDIP
4.	Ngampilan	PKS
5.	Pakualaman	Partai Demokrat
6.	Gondokusuman	Partai Demokrat
7.	Wirobrajan	PDIP
8.	Gondomanan	PAN
9.	Tegalrejo	Partai Demokrat
10.	Jetis	PDIP
11.	Danurejan	PKS
12.	Umbulharjo	Partai Golkar
13.	Kotagede	PAN
14.	Gedongtengen	PDIP

Sumber: Wawancara dengan Bapak Widodo Cahyono Putra, Mei 2013

Namun seiring dengan berjalannya waktu dan semakin matangnya demokrasi di Indonesia, basis massa itu cenderung berkurang. Hal ini ditandai dengan meningkatnya proporsi pemilih yang menjatuhkan pilihan berdasarkan tawaran isu, kandidat, dan faktor situasional.

Pendidikan politik pada masyarakat Kota Yogyakarta sudah cukup baik. Hal ini terbukti dari sikap politik sebagian anggota masyarakat. Saat ini masyarakat mampu memilah semua janji yang disampaikan oleh partai politik peserta pemilu ketika kampanye, dan ketika menjelang Pemilu berlangsung (mendekati hari H) masyarakat melakukan penyaringan (*filter*) terhadap janji partai politik yang sekiranya dapat diwujudkan dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat yaitu yang menyangkut kebutuhan sosial secara umum. Setelah pemilu berakhir dan partai politik yang didukung atau dipilih oleh masyarakat benar-benar menang, maka masyarakat akan menanyakan (berani menagih) janji yang disampaikan partai politik tersebut sebelum pemilu. Jika partai tersebut memenuhi janjinya, maka masyarakat akan loyal terhadap partai tersebut, tetapi jika partai yang menang mengingkari janjinya, masyarakat akan beralih memilih partai lain.

Kemajuan pendidikan politik di Kota Yogyakarta tidak terlepas dari kemajuan tingkat pendidikan masyarakat Kota Yogyakarta. Demikian pula faktor lingkungan juga mempengaruhi. Keberadaan Yogyakarta sebagai gerbang ilmu pengetahuan yang ditandai dengan banyaknya kampus membawa pengaruh yang cukup signifikan. Pola pikir atau kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendidikan bertambah. Jumlah penduduk

juga bertambah secara signifikan karena adanya para pendatang (pegawai dan mahasiswa), sehingga secara umum taraf kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta meningkat sejalan dengan meningkat pesatnya dunia pendidikan di wilayah Kota Yogyakarta.

Kehidupan politik masyarakat Kota Yogyakarta berjalan secara wajar dan aman, meskipun mereka memiliki pilihan politik yang berbeda. Kesadaran untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan semakin tinggi, termasuk menghargai perbedaan pilihan politik.

2. Gambaran Umum Subjek Penelitian

a. Responden

Responden ini adalah warga Kota Yogyakarta yang mempunyai hak pilih aktif pada Pemilu Legislatif 2004 dan Pemilu Legislatif 2009. Dari jumlah penduduk sebanyak 397.398 jiwa yang tersebar di 14 kecamatan, sebagian besar telah memenuhi persyaratan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Legislatif 2009. Ada 331.105 pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 09 April 2009 yang tersebar dalam 956 TPS. Jumlah pemilih ini terdiri dari penduduk asli Kota Yogyakarta, dan penduduk pendatang yang sebagian besar yaitu para mahasiswa yang terdaftar dan ikut memilih di wilayah Kota Yogyakarta.

Penelitian ini melibatkan 28 orang responden, mengambil tiap-tiap kecamatan sebanyak dua orang responden. Sedapat mungkin responden diwakili berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pekerjaan, dengan tiap-tiap responden mengikuti Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

Penerapan mekanisme wawancara dengan pola semacam itu didukung melalui pendekatan yang disampaikan beberapa pakar. Bahwa, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel, subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.⁴⁵ Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail, subjek yang diteliti terdiri dari satu unit yang dipandang sebagai kasus. Kasus dapat terbatas pada satu orang, satu keluarga, satu lembaga, satu peristiwa, satu tempat, kelompok manusia, dan kelompok objek-objek lain yang cukup terbatas yang dipandang satu kesatuan.⁴⁶ Memilih responden dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat misalnya batasan umur, jenis kelamin, status perkawinan.⁴⁷ Nama responden tercatat dalam lampiran 2.

Tabel 3.2:

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Sub Total	Prosentase
1.	Laki-laki	13	46,43
2.	Perempuan	15	53,57
Total		28	100%

Sumber: Wawancara Mei dan Juli 2013

⁴⁵ Bagong Suyanto dan Sutinah (Ed.), *Op. Cit.* Hal: 171

⁴⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Ed. Rev., Cet. 9, Tarsito, Bandung, 2004

⁴⁷ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (Ed.), *Metodologi Survey*, Ed. Rev., Cet. 19, LP3ES, Jakarta, 2008. Hal: 192

Tabel 3.3:
Responden Berdasarkan Usia

No.	Tingkat Umur	Sub Total	Prosentase
1.	22 – 32 tahun	2	7,14%
2.	33 – 43 tahun	7	25%
3.	44 – 54 tahun	14	50%
4.	55 tahun dan >	5	17,86%
Total		28	100%

Sumber: Wawancara Mei dan Juli 2013

Tabel 3.4:
Responden Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Sub Total	Prosentase
1.	Tidak Bersekolah	1	3,57%
2.	SD	9	32,14%
3.	SMP	5	17,86%
4.	SMA	13	46,43%
Total		28	100%

Sumber: Wawancara Mei dan Juli 2013

Tabel 3.5:
Responden Berdasarkan Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Sub Total	Prosentase
1.	Swasta/Wiraswasta	15	53,57%
2.	Ibu Rumah Tangga	8	28,57%
3.	Buruh	5	17,86%
Total		28	100%

Sumber: Wawancara Mei dan Juli 2013

b. Informan

Dalam penelitian ini yang difungsikan sebagai informan adalah para pejabat atau staf di struktur pemerintahan Kota Yogyakarta dan instansi tertentu yang terkait dengan penelitian. Rata-rata mereka berpendidikan tinggi dan bermatapencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Nama informan dapat dilihat pada lampiran 2.

B. Pembahasan

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pilihan Politik Masyarakat

Pemilu Legislatif 2009 menghasilkan perubahan yang signifikan bagi peta politik Kota Yogyakarta. Perubahan yang tampak nyata pada Pemilu Legislatif 2009 jika dibandingkan dengan pada Pemilu Legislatif 2004 adalah jumlah pilihan mayoritas masyarakat terhadap partai politik tertentu. Dari data dokumentasi panitia pemilihan diketahui bahwa pilihan mayoritas masyarakat Kota Yogyakarta pada pada Pemilu Legislatif 2004 adalah PDI Perjuangan, sedangkan pada Pemilu Legislatif 2009 pilihan mayoritas masyarakat bergeser ke Partai Demokrat.

Pada Pemilu Legislatif 2009 terdapat 38 partai yang bersaing secara nasional. Partai-partai bebas menentukan *platform* politik. Pada saat yang sama, perilaku komunikasi massa dan komunikasi interpersonal jauh lebih bebas dibandingkan sebelumnya. Perubahan lingkungan politik tersebut mengubah pengetahuan, keyakinan, dan pemaknaan para pemilih terhadap partai politik.

Penelitian ini melibatkan 28 orang responden, namun lima diantaranya tidak valid (*in valid*) dengan masalah yang diteliti. Kelima responden tersebut tidak mengalami pergeseran pilihan politik antara Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, sehingga kelima responden yang *in valid* tersebut tidak masuk dalam analisis data untuk mengetahui penyebab pergeseran pilihan politik. Nama responden yang berhasil diwawancarai dapat dilihat pada lampiran 2.

Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat hak pilih aktif, bebas menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Ia bebas menentukan partai manapun yang menjadi pilihannya, bisa loyal dan bisa juga berubah. Pada kenyataannya, sebagian pemilih mengubah pilihan politiknya dari suatu pemilu ke pemilu lainnya. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada Pemilu Legislatif 2009 banyak di antara warga masyarakat Kota Yogyakarta yang melakukan perubahan pilihan politiknya. Namun tingkat perubahan itu berbeda, tergantung pada individu dan kelompok yang melakukan perubahan terhadap pilihan politiknya tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pilihan politik masyarakat, antara lain:

a. Faktor Kekecewaan terhadap Partai Lama

Pendidikan politik untuk sebagian masyarakat Indonesia saat ini sudah baik, termasuk pendidikan politik pada masyarakat Kota Yogyakarta. Sebagian warga masyarakat mulai cerdas dalam menentukan pilihan. Masyarakat mengamati dan melakukan penilaian terhadap partai-partai yang akan bersaing dalam pemilu. Meskipun penilaian mereka bersifat subjektif, didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman individu

atau kelompok masing-masing. Pengalaman masa lalu (pemilu sebelumnya) sering dijadikan acuan pada pemilu berikutnya. Janji partai politik saat menjelang pemilu yang tidak ditepati dan harapan masyarakat akan kehidupan yang lebih baik yang tidak terwujud sering kali menyebabkan pemilih kecewa terhadap partai politik tertentu, sehingga mereka tidak lagi memilih partai tersebut pada pemilu berikutnya.

Pernyataan partai politik kontestan pemilu yang beraroma surgawi seperti semua warga negara akan mendapat cukup pendidikan, cukup pangan, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta penerapan asas-asas hukum yang mandiri, ternyata tidak terealisasi, sebaliknya rakyat justru dihadapkan dengan berbagai kesulitan hidup seperti angka pengangguran yang tinggi, kenaikan harga BBM, dan beban biaya listrik, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga-harga kebutuhan ekonomi lainnya sehingga menyebabkan massa pemilih merasa kecewa dan pada pemilu berikutnya mereka cenderung mengubah pilihannya kepada partai baru atau partai lain yang berbeda dengan partai lama yang dipilih pada pemilu sebelumnya.

Terdapat sebanyak 6 (enam) orang (26,09%) responden yang merasa kecewa terhadap partai yang dipilihnya pada pada Pemilu Legislatif 2004 (lihat lampiran 3), akibatnya mereka tidak lagi mempercayai partai tersebut dan pada Pemilu Legislatif 2009 menetapkan pilihan politiknya pada partai lain.

Dari hasil wawancara, hal yang menyebabkan responden kecewa terhadap partai lamanya, sebagian besar mengungkapkan karena setelah partai yang dipilihnya menang, keadaan tetap saja, tidak terjadi perubahan. Misalnya lapangan kerja sedikit, harga barang-barang tinggi, perekonomian tidak berkembang. Bapak Wahono Sugeng Slamet (Wawancara, Mei 2013) mengungkapkan alasannya kecewa terhadap partai yang dipilihnya dulu, “karena partai yang dulu hanya janji-janji belaka, tanpa ada bukti atau kenyataan”.

b. Faktor Kelas Sosial dan Kelompok Sosial

Perilaku politik para pemberi suara (*voters*) yang menetap dilandasi oleh sikap dan sosialisasi, sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku politiknya. Sikap itu terbentuk melalui sosialisasi yang berlangsung lama, bahkan sejak seorang calon pemilih masih berusia dini. Pada usia dini seorang calon pemilih telah menerima pengaruh politik dari orang tuanya, baik dari komunikasi langsung maupun dari pandangan politik yang diekspresikan orang tuanya. Sikap tersebut menjadi lebih mantap ketika menghadapi pengaruh berbagai kelompok acuan seperti pekerjaan, kelompok pengajian dan sebagainya. Proses panjang sosialisasi itu kemudian membentuk ikatan yang kuat dengan partai politik atau organisasi kemasyarakatan lainnya.

Menurut Nimmo, perilaku pemberi suara dibentuk oleh faktor-faktor jangka panjang, terutama faktor sosial. Karakter kelompok sosial dimana pemilih itu berada, memberi pengaruh sangat penting dalam

proses pembentukan ikatan emosional pemilih dengan simbol-simbol partai, terutama pada awal proses sosialisasi.⁴⁸

Simbol-simbol kelompok dan ikatan kesejarahan dengan proses tertentu dapat melekat pada simbol-simbol partai. Mereka beranggapan bahwa partai tersebut telah berjasa dalam mengubah nasibnya. Selama ini diyakini partai tertentu telah memberikan kemudahan-kemudahan tertentu bagi kelompoknya beserta fasilitas yang menguntungkan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian, semua responden yang bermatapencarian di sektor swasta dan berpenghasilan menengah ke bawah melakukan perubahan pilihan politiknya pada Pemilu Legislatif 2009 dengan partai yang hampir sama secara platform. Mereka sangat mantap dan yakin terhadap aliran politik yang dipilihnya sejak dulu.

Sebanyak 3 (tiga) orang (13,04%) responden dalam penelitian ini mengubah pilihannya pada Pemilu Legislatif 2009 karena faktor kelas sosial dan kelompok sosial (lihat lampiran 3). Karakteristik sosial dan pengelompokan sosial yang meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, latar belakang keluarga, aspek geografis, faktor kelas atau status ekonomi, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal memiliki peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi, dan orientasi seseorang. Berdasarkan hasil penelitian, sejumlah responden dengan taraf perekonomian menengah ke bawah memiliki orientasi untuk memilih partai yang secara *platform* mirip dari satu pemilu ke pemilu berikutnya.

⁴⁸ Adman Nursal, *Op. Cit.* Hal: 61

Responden yang taraf perekonomiannya menengah ke bawah merasa yakin dan mantap dengan partai lain yang dipilihnya namun masih memiliki kesamaan asas. Hal ini terkait dengan sikap pandangan politik seorang pemilih terhadap suatu partai politik tertentu. Mereka, terutama untuk pemilih yang bekerja di sektor buruh, merasa perlu ada perbaikan nasib dengan memilih partai tertentu yang masih sehaluan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Muhammad Novel dan Ibu Lina Dwi Kartini (Wawancara, Mei 2013) berprofesi sebagai pekerja swasta dan Ibu Rumah Tangga. "Dari sejak mengikuti pemilu hingga kini saya memilih partai Islami yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya memilih partai lain karena selain tetap partai Islam, saya lebih percaya bahwa partai yang saya pilih kemudian lebih mampu memperjuangkan nasib rakyat kecil yang seperti kami".

c. Faktor Kepemimpinan dan Ketokohan

Menurut Soerjono Soekanto, kepemimpinan adalah kemampuan dari seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain (para pengikutnya) untuk bertingkah laku sebagaimana dikehendaki pemimpinnya.⁴⁹

Pemimpin dapat dibedakan menjadi pemimpin formal (resmi) seperti ketua RT, kepala, bupati, gubernur dan sebagainya. Selain itu, terdapat pemimpin informal yang sering disebut juga tokoh masyarakat seperti kyai, haji, cendikia, dan sebagainya.

⁴⁹ *Ibid.* Hal: 89

Kepemimpinan resmi selalu harus berada di atas landasan-landasan atau peraturan-peraturan resmi, sehingga daya cakupannya agak terbatas, sedangkan ruang lingkup kepemimpinan informal tidak memiliki batas-batas resmi kecuali pengakuan dan kepercayaan masyarakat. Baik pemimpin formal maupun pemimpin informal, memiliki kekuatan yang dapat menggerakkan masyarakat mencapai tujuan tertentu, termasuk mempengaruhi perilaku pemilih.

Berdasarkan hasil penelitian, para responden yang mempunyai ikatan kuat dengan para pemimpin agama, cenderung memilih partai berbasis agama. Para pemilih masih memandang para pemimpin sebagai figur yang harus dipatuhi segala tindakan dan perilakunya. Pemilih partai berbasis agama mempunyai kecenderungan fanatisme dan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi kepada pemimpin agamanya. Individu-individu yang terikat, patuh, dan menjunjung tinggi kearifan para alim ulama, cenderung memilih partai berbasis agama.

Dewasa ini seorang pemimpin banyak mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Berbagai media cetak dan elektronik memberitakan tindakan para pemimpin, baik pemimpin formal maupun informal, baik di tingkat daerah maupun pusat. Sebagian masyarakat Kota Yogyakarta dalam memilih partai pada Pemilu Legislatif 2009, dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang (17,39%) responden, melihat pilihan tokoh masyarakat yang disegani (lihat lampiran 3). Perilaku pemilih

dipengaruhi pemimpin baik formal maupun informal dalam hal ini cendekiawan, tokoh masyarakat sekitar, dan sebagainya.

Menurut Bapak Widodo Dimulyo (Wawancara, Mei 2013), "Pola pilihan masyarakat masih mengikuti pilihan tokoh agama, cendekiawan dan lain sebagainya yang disegani. Jika tokoh tersebut memilih partai politik tertentu masyarakat juga ikut memilih partai tersebut. Paradigma ini terutama diikuti oleh para pemilih golongan tua, sebagian warga masyarakat segan dan hormat kepada kyai, tokoh berpengaruh, dan menjadikan beliau-beliau sebagai tokoh panutan".

d. Faktor Identifikasi Partai

Identifikasi merupakan dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain tanpa disadari. Menurut Gaffar, orientasi sosio religius mempunyai korelasi nyata terhadap perilaku pemilih PPP dan PDI Perjuangan. Santri cenderung memilih partai Islam dan kaum abangan memilih partai yang tidak membela dan memajukan Islam. *Voters* yang memiliki landasan ideologis kuat, memilih PPP yang sebagai partai Islam. Mereka bersikap, seorang muslim yang baik menjadi Islam secara menyeluruh, termasuk memilih partai Islam.⁵⁰

Institusi Masjid dan Musholla sangat mewarnai sikap dan perilaku para santri. Masjid merupakan tempat penanaman nilai-nilai yang mengarahkan formasi dasar solidaritas dan persaudaraan umat. Kelompok santri tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan para

⁵⁰ *Ibid.* Hal: 81

pemimpin agama seperti kyai, tokoh yang menjadi komando solidaritas umat Islam. Keputusan politik pada kalangan santri lebih menekankan pertimbangan primordial ketimbang pertimbangan rasional.

Menurut hasil penelitian, sebagian masyarakat pemilih di Kota Yogyakarta memilih partai politik Islam, sebab mereka memeluk agama Islam. Secara ukhrowi, akan bernilai ibadah jika mereka mendukung partai politik Islam. Kuatnya pengaruh identifikasi terhadap perilaku pemilih berkaitan dengan fungsi sikap. Menurut Greenstein, seperti dikutip Asfar⁵¹, sikap memiliki tiga fungsi yaitu:

1) Fungsi Kepentingan

Bahwa penilaian terhadap suatu objek diberikan berdasarkan motivasi, minat, dan kepentingan orang tersebut.

2) Fungsi Penyesuaian Diri

Bahwa seseorang bersikap tertentu sesuai dengan keinginan untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang disegani atau kelompok panutannya.

3) Fungsi Eksternalisasi dan Pertahanan Diri

Bahwa upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis, yang berwujud mekanisme pertahanan dan eksternalisasi diri seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi, dan identifikasi.

Masyarakat Kota Yogyakarta lebih menekankan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri pada proses identifikasi partai,

⁵¹ *Ibid.* Hal: 60

sehingga dari satu periode pemilu ke pemilu berikutnya ada kecenderungan bagi sebagian masyarakat Kota Yogyakarta untuk loyal kepada partai Islam. Responden yang mengidentifikasi diri mereka dengan partai Islam, menyatakan orang tua mereka juga mengidentifikasi diri dengan partai yang sama.

Sebagian massa pemilih di Kota Yogyakarta, dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) orang (21,74%) responden, mengubah pilihan politiknya karena faktor identifikasi partai (lihat lampiran 3). Identifikasi dilakukan orang kepada orang lain yang dianggapnya ideal dalam suatu segi, bila dibandingkan dengan pilihan yang tersedia sebelumnya barangkali pilihan berikutnya lebih tepat. Faktor demografi (usia, gender, agama) berkorelasi dengan identifikasi partai. Dengan identifikasi partai, pemilih relatif mempunyai pilihan yang lebih pas dari pemilu sebelumnya, seseorang memilih partai yang betul-betul mewakili pilihannya. Meski begitu pilihan yang diberikan tidak akan bergeser terhadap partai yang tidak berplatform sama. Orang tersebut tidak terpengaruh oleh perubahan lainnya termasuk lingkungan sekitar, tidak terpengaruh oleh komunikasi sosial politik menjelang dan saat kampanye politik.

Sebagian kelompok agama tertentu memiliki hubungan emosional yang kuat dan panjang dengan partai tertentu. Sebagian besar responden yang memilih PPP, memilih partai tersebut sebagai tradisi keluarga. Orang tua mereka berasal dari kelompok muslim santri yang sangat taat.

Para orang tua secara tradisional memilih partai Islam, mulai dari Masyumi ke Parmusi, ke PPP, ke PKB, kemudian ke PPP lagi atau dari NU ke NU lagi. Menurut Ibu Murjiah (Wawancara, Mei 2013) “Dari dulu saya memilih partai Islam, sebab kata sesepuh jika memilih partai yang tidak memegang rukun Islam, bisa celaka”.

Dalam menentukan pilihan politik, tak jarang anggota masyarakat yang melakukan identifikasi dengan cara mengikuti arus yang dianggap paling dominan. Menurut Bapak Widodo Dimulyo (Wawancara, Mei 2013) “Yang menjadi dasar bagi masyarakat dalam menentukan pilihan politik ketika pemilu adalah dengan melihat lingkungan mayoritasnya, di Yogyakarta masyarakatnya nasionalis, sementara segi agama mayoritas Islam dan penganut Muhammadiyah sehingga dari satu pemilu ke pemilu berikutnya selalu partai nasionalis dan Islami Muhammadiyah yang menang yaitu antara PDI Perjuangan *versus* partai nasionalis lainnya dan PAN. PDI Perjuangan merupakan partai nasionalis, sementara PAN bagian partai Islam yang berbasis Muhammadiyah”.

e. Faktor Isu dan Kebijakan Politik

Setiap partai politik bebas mengemas isu dan programnya. Partai politik menarik perhatian masyarakat dengan cara membuat kebijakan yang menyangkut kebutuhan sosial secara umum. Kebijakan itu bisa bersifat lokal maupun nasional. Pada pemilu Orde Reformasi (Pemilu 1999, Pemilu Legislatif 2004, dan pada Pemilu Legislatif 2009) faktor isu dan program memberi pengaruh signifikan terhadap perilaku pemilih,

terutama pada pemilih kalkulatif. Pilihan mereka sangat tergantung pada faktor-faktor situasional. Pola pilihannya tidak tetap dari pemilu ke pemilu. Mereka tidak loyal terhadap partai politik tertentu. Semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, semakin meningkatkan daya kritis masyarakat terhadap isu dan kebijakan politik yang ditawarkan pada saat pemilu. Hal ini yang menyebabkan pentingnya peranan isu dan kebijakan politik terhadap perilaku pemilih.

Menurut Bapak Widodo Cahyono Putra (Wawancara, Mei 2013), kemenangan Partai Demokrat di tahun 2009 di Kota Yogyakarta disebabkan karena partai tersebut berhasil mengambil hati masyarakat melalui program atau kebijakan yang diberikan kepada warga masyarakat Kota Yogyakarta. Karena faktor demografi, masyarakat Yogyakarta terdiri dari beragam etnis dengan latar belakang mata pencarian yang beragam. Pada Pemilu Legislatif 2009 yang lalu Partai Demokrat berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagai macam program pro rakyat. Program pro rakyat yang telah disuguhkan sebelumnya sangat dirasakan masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Karena sebagian warga masyarakat Yogyakarta merasa Partai Demokrat telah berjasa dalam memenuhi kebutuhan mereka secara umum, maka pada saat pemilu mereka sudah tidak ragu lagi untuk mendukung Partai Demokrat.

Ketika menjelang pemilu, sebagian besar partai politik peserta pemilu menawarkan program dan kebijakan politik yang akan dilakukan ketika partai tersebut menang dalam pemilu. Partai politik menjanjikan

berbagai hal untuk mendapatkan dukungan rakyat. Meskipun tidak semua hal yang dijanjikan oleh partai dipenuhi, namun sedikit banyak hal ini ikut mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Ada 3 (tiga) orang (13,04%) responden yang menjawab bahwa ketika memilih, hal yang menjadi pertimbangan adalah karena program dan kebijakan serta janji partai politik (lihat lampiran 3). Namun ada juga responden yang menjawab bahwa mereka sudah tidak percaya lagi terhadap program dan janji yang ditawarkan oleh partai politik peserta pemilu, sebab kebanyakan program dan janji itu tidak dilaksanakan atau diingkari. Tetapi ini hanya untuk sebagian kecil responden.

Ibu Dalrini Sarjiati, seorang Ibu Rumah Tangga (Wawancara, Mei 2013) mengungkapkan “Saya memilih partai, karena saya cocok dengan janji partai tersebut”. Ibu Tri Jariyah, juga seorang Ibu Rumah Tangga (Wawancara, Mei 2013) mengatakan “Hal yang menjadi pertimbangan ketika saya memilih adalah visi dan misi partainya”.

f. Faktor Komunikasi dan Persuasi dalam Kampanye

Sesaat menjelang Pemilu yaitu pada masa-masa kampanye, sosialisasi, komunikasi, dan persuasi partai politik terhadap massa pemilih (*voters*) sangat intens dilakukan. Pasokan informasi berasal dari berbagai pihak seperti orang tua, tokoh masyarakat, dan media massa. Namun faktor media massa yang paling dominan dan cepat mempengaruhi perilaku pemilih, baik media cetak maupun media elektronik.

Partai politik terutama partai-partai besar melakukan kampanye dengan memasang iklan di televisi, radio, media cetak, *website*, dan media luar ruang. Dengan ketentuan waktu dan tempat yang diatur oleh peraturan kampanye, partai politik bebas memasang poster, *leaflet*, bendera, spanduk, *billboard*, dan bahkan membuat posko. Alat-alat kampanye ini berperan penting untuk membangun *awareness* terhadap kontestan.

Berdasarkan hasil penelitian, iklan politik, khususnya iklan audiovisual seperti televisi, memainkan peranan strategis dalam mempengaruhi pilihan massa, sebab televisi merupakan barang elektronik terlengkap yang menyajikan berbagai berita dan hiburan, dan dimiliki oleh sebagian besar warga masyarakat Kota Yogyakarta. Rata-rata responden memperhatikan berita-berita seputar pemilu melalui tayangan televisi.

Menurut Linda Laid,⁵² ada tiga pengaruh iklan televisi terhadap para pemilih, antara lain:

1) Pengetahuan Pemilih

Para pemilih lebih mudah mengetahui isu-isu spesifik dan posisi kontestan terhadap isu tertentu. Pemilih yang tingkat keterlibatannya sedikit dalam kampanye, lebih mudah terpengaruh oleh iklan politik.

⁵² *Ibid.* Hal: 256

2) Persepsi terhadap Kontestan

Pemilih dapat melakukan evaluasi terhadap kontestan. Iklan televisi memberi dampak signifikan terhadap tingkat kesukaan pemilih terhadap kontestan, khususnya terhadap kebijakan serta kualitas kontestan.

3) Preferensi Pilihan

Iklan politik mempunyai pengaruh terhadap preferensi pilihan, khususnya bagi pemilih yang menetapkan pilihan pada saat-saat terakhir. Variabel penting yang mempengaruhi preferensi tersebut adalah formasi citra dan tingkat *awareness* para pemilih terhadap kontestan.

Menurut hasil penelitian sebagian besar warga masyarakat Kota Yogyakarta tidak pernah mengikuti kegiatan kampanye (pawai, orasi politik) yang diselenggarakan oleh partai politik ketika menjelang pemilu, alasannya masyarakat sudah terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehari-hari. Melihat tindakan semacam itu, maka faktor media massa terutama iklan televisi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku pemilih.

Banyak hal yang bisa dilakukan oleh partai politik peserta pemilu untuk menarik simpati masyarakat pemilih (*voters*). Ada partai politik yang gencar melakukan kampanye melalui media massa, baik cetak maupun elektronik, selain itu tidak ketinggalan kampanye dilakukan secara terbuka dengan melibatkan massa yang relatif banyak.

Pola komunikasi dan persuasi dalam kampanye dari responden yang diteliti, sebanyak 2 (dua) orang (8,70%) responden mempertimbangkan faktor ini ketika menentukan pilihan politik pada saat pemilu legislatif (lihat lampiran 3).

Secara nasional kampanye melalui media elektronik seperti televisi lebih banyak menjadi pilihan para partai politik peserta pemilu, sebab dengan sarana ini lebih mengena atau mencapai sasaran. Televisi adalah media hiburan sekaligus pendidikan yang murah dan dimiliki hampir oleh semua kalangan masyarakat.

Selain itu, partai politik juga merangkul pihak lain yaitu tokoh masyarakat tertentu untuk membantu mengajak konstituen mendukung partai politik tertentu. Pada masyarakat pedesaan biasanya masih mempercayai seseorang yang dianggap penting dan menjadi patokan dalam memutuskan segala sesuatu, termasuk memutuskan pilihan politik ketika pemilu. Seorang kyai misalnya, ia akan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap santrinya, apalagi untuk kalangan masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam seperti di Kota Yogyakarta ini.

Di antara beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perubahan pilihan massa pemilih, faktor yang paling dominan adalah faktor isu dan kebijakan politik. Kebijakan kontestan pemilu yang sifatnya nyata, yang menyangkut kebutuhan sosial secara umum dan dapat langsung dirasakan oleh seluruh warga masyarakat mempunyai preferensi kuat untuk mempengaruhi pilihan politik massa pemilih. Pada Pemilu Legislatif 2004

Partai Demokrat berhasil mengambil simpati masyarakat pemilih, khususnya untuk kalangan masyarakat pemilih di Kota Yogyakarta. Kebijakan umum yang dilakukan pemerintah yang oleh masyarakat dipandang sebagai kebijakan politik Partai Demokrat yakni dengan berbagai macam capaian program pro rakyat, sehingga proyek-proyek atas program pro rakyat yang dibuat pemerintah sangat didukung oleh warga masyarakat Kota Yogyakarta pada umumnya.

Platform dasar yang ditawarkan oleh kontestan pemilu pada saat itu cukup mendapat perhatian masyarakat pemilih. Kebijakan atau program yang diperjuangkan dan dijanjikan oleh partai turut mempengaruhi pilihan massa pemilih (*voters*) hal ini yang terjadi pada masyarakat pemilih Kota Yogyakarta.

2. Pola Perubahan Pilihan Politik Masyarakat

Menurut hasil penelitian sebagian besar masyarakat Kota Yogyakarta mengubah pilihan politiknya pada Pemilu Legislatif 2009. Untuk mengetahui pola perubahan pilihan massa pemilih (*voters*) di Kota Yogyakarta, peneliti melakukan analisis berdasarkan variabel asas partai politik yang menjadi pilihan *voters*.

Moore yang dikutip Astrid⁵³, mengemukakan ada dua pola perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat, yaitu:

⁵³ S. Astrid Phil Susanto, *Op. Cit.* Hal: 179

a. Pola Perubahan Linear

Dalam teori perubahan linear ada anggapan bahwa perubahan akan selalu kembali ke fase sebelumnya. Jika perubahan berlangsung dalam jangka waktu yang pendek, maka terdapat kecenderungan perubahan tersebut menurut garis lurus atau menurut siklus yang meningkat. Tetapi jika perubahan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, maka perubahan tersebut dapat berbentuk spiral yaitu kembali dalam tingkat keadaan yang sama tetapi lebih tinggi dan mempunyai efek yang lebih luas.

b. Pola Perubahan Non linear

Perubahan non linear bentuknya bercabang dengan tendensi menaik, sehingga perubahan non linear mewujudkan pertumbuhan dan kebhinekaan. Perubahan non linear berlangsung dalam jangka waktu yang relatif cepat.

Secara umum pada Pemilu 2009 masyarakat Kota Yogyakarta mengubah pilihan politiknya. Dengan berbagai alasan yang berbeda di antara individu yang satu dengan individu lainnya, massa pemilih (*voters*) berusaha memantapkan pilihannya pada partai politik tertentu, dengan harapan partai pilihannya itu dapat melakukan pembaharuan terhadap segala sendi kehidupan agar dapat mengobati kekecewaan terhadap partai lama yang dipilih pada pada Pemilu Legislatif 2004 yang ternyata belum sesuai dengan keinginan atau harapan massa pemilih (*voters*).

Dari hasil penelitian diketahui pada Pemilu Legislatif 2009 sebagian besar responden yakni 23 orang (82,14%) mengalami pergeseran pilihan politik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6:

Sikap Pilihan Politik Responden pada Pemilu Legislatif 2009

No.	Pilihan Politik	Jumlah	Prosentase
1.	Tetap	5	17,86%
2.	Bergeser atau berubah	23	82,14%
3.	Golput	0	0%
	Jumlah	28	100%

Sumber: Hasil Penelitian, Mei dan Juli 2013

Sebagian besar pemilih mengubah pilihan politiknya pada partai politik yang memiliki asas yang sama yaitu nasionalis. Menurut Bapak Widodo Cahyono Putra, seorang yang sehari-hari berprofesi sebagai penjual Mie Ayam (Wawancara, Mei 2013) alasan ia mengubah pilihan politiknya adalah “Karena partai yang saya pilih pada Pemilu Legislatif 2009 kemarin, hampir sama atau merupakan perkembangan dari partai yang saya pilih pada Pemilu Legislatif 2004”.

Sebagian pemilih mengubah pilihannya dari PDI Perjuangan ke Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Hanura dan sebagainya, ada yang sebaliknya dari Partai Golkar ke PDI Perjuangan, sebagian lagi mengubah pilihannya dari PAN ke PMB, PPP ke PKB dan sebagian kecil lainnya mengubah pilihan politiknya ke partai berbasis nasionalis dan Islam. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel 3.7:
Pola Perubahan Pilihan Politik

No.	Pola Perubahan	Sub Total	Total	Prosentase
1.	Linear			
	Partai Demokrat - Partai Gerindra	1	21	91,30%
	Partai Golkar - Partai Demokrat	1		
	Partai Golkar - Partai Hanura	1		
	Partai Golkar - PDI Perjuangan	2		
	PAN - PKS	1		
	PAN - PMB	2		
	PDI Perjuangan - Partai Demokrat	1		
	PDI Perjuangan - Partai Gerindra	4		
	PDI Perjuangan - Partai Hanura	2		
	PDI Perjuangan - PDP	1		
	PDI Perjuangan - Partai Republikan	1		
	PKB - PPP	1		
	PPP - PKB	2		
	PPP - PKS	1		
2	Non linear			
	PBB - Partai Demokrat	1	2	8,70%
	PKS - Partai Demokrat	1		
Total		23	23	100%

Sumber: Hasil Penelitian, Mei dan Juli 2013

Masyarakat Kota Yogyakarta lebih cenderung memilih partai-partai besar, yang sudah lama bersaing di pentas perpolitikan Indonesia, namun begitu tidak semua memandang sebelah mata akan kehadiran partai yang relatif baru yang diharapkan mampu membawa perubahan menuju perbaikan. Menurut Bapak Widodo Dimulyo (Wawancara, Mei 2013) "Partai-partai lama lebih memiliki kematangan sistem dibandingkan dengan partai politik yang baru, hanya saja kehadiran partai politik baru turut mewarnai pesta demokrasi rakyat yang diadakan lima tahun sekali".

Berdasarkan hasil penelitian jika dikaitkan dengan teori di atas, maka pola perubahan pilihan masyarakat Kota Yogyakarta adalah linear (lihat tabel 3.3). Artinya perubahan pilihan politik masyarakat masih berada dalam satu garis lurus, jika dilihat dari asas partainya. *Voters* memilih partai yang berbeda antara pada Pemilu Legislatif 2004 dan Pemilu Legislatif 2009, namun asas kedua partai yang dipilihnya tersebut sama (sama-sama partai nasionalis atau sama-sama partai agama). Tetapi secara mayoritas *voters* mengubah pilihannya secara linear terhadap partai-partai yang berasas nasionalis.

Perilaku *voters* di Kota Yogyakarta masih bersifat primordialisme dan tradisionalisme. Pemilih cenderung mengidentifikasi diri dengan partai yang memiliki basis ideologi tertentu. Kelompok nasionalis pada masyarakat Kota Yogyakarta lebih cenderung memilih parta-partai berbasis nasionalis pula, begitu juga kelompok santri akan menempatkan pilihannya terhadap partai berbasis Islam. Selanjutnya, tindakan sebagian masyarakat Kota Yogyakarta yang mengubah pilihan politiknya secara linear terhadap partai-partai nasionalis dapat dikategorikan dalam tipe budaya parokial. Menurut Sastroatmodjo⁵⁴, dalam tipe budaya politik parokial, masyarakat tidak menaruh minat begitu besar terhadap objek politik yang luas, tetapi hanya dalam batas tertentu, yakni keterikatan pada objek yang relatif sempit yaitu religi.

⁵⁴ Sudijono Sastroatmodjo, *Op. Cit.* Hal: 48

Di samping perubahan linear, ada juga sebagian *voters* yang mengikuti pola perubahan non linear. Pemilih mengubah pilihan politiknya tanpa memperhatikan keterkaitan antara partai lama dengan partai yang baru dipilihnya, terutama keterkaitan dalam asas partainya. Mereka berpindah dari partai yang berbasas nasionalis kepada partai yang berbasas agama (Islam) atau sebaliknya, dari partai yang berbasas agama (Islam) ke partai yang berbasas nasionalis. Namun berdasarkan hasil penelitian, hanya sebagian kecil masyarakat Kota Yogyakarta yang tergolong melakukan perubahan pilihan politik secara non linear, karena sebagian besar masyarakat Kota Yogyakarta pola perubahan pilihan politiknya pada Pemilu Legislatif 2009 bersifat linear.